

## Danlantamal IX Dapat Kejutan Spesial dari Kapolda Maluku

AMBON (IM) - Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) IX Ambon, Brigjen TNI (Mar) Said Latuconsina, mendapat kejutan spesial dari Kapolda Maluku, Irjen Lotharia Latif dan Danlanud Kolonel Pnb Tio Hutapea, serta Manajemen Swiss Bell Hotel Ambon pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 TNI AL Tahun 2023, Senin (11/9).

Suasana kebersamaan, keakraban, dan sinergitas terlihat jelas antara TNI dan Polri saat kedatangan Kapolda Maluku dan Danlanud Pattimura bersama staf dan jajarannya serta Staf Manajemen hotel Swiss Bell Kota Ambon di Gedung J. Leimena, Mako Lantamal IX.

Mereka memberikan kejutan berupa ucapan dan membawa kue ulang tahun bertuliskan "Dirgahayu TNI Angkatan Laut ke-78". Lagu selamat ulang tahun kemudian dinyanyikan pada perayaan hari jadi

TNI Angkatan Laut ke-78 yang bertepatan.

"Saya, Danlanud dan manajemen Swiss Bell Hotel Ambon mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-78 TNI Angkatan Laut, semoga TNI Angkatan Laut semakin jaya, semakin profesional, dan semakin dicintai oleh masyarakat. Jalasveva Jayamahe," ucap Kapolda Maluku mengawali sambutannya di acara kejutan tersebut, dalam keterangannya, Selasa (12/9).

Danlantamal IX di tempat terpisah menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas kejutan yang diberikan langsung oleh Kapolda Maluku, Danlanud Pattimura, dan Staf Manajemen Hotel Swiss Bell Hotel Kota Ambon.

Kejutan itu berlangsung meriah dengan disaksikan personel Lantamal IX mulai dari Perwira, Bintara, Tamtama, dan Pegawai Negeri Sipil Lantamal IX. ● mei

## Putri Syahrul Yasin Limpo Gantikan Posisi Menantu Ma'ruf Amin di DPR

JAKARTA (IM) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melantik tiga anggota DPR pengganti antarwaktu (PAW) di sisa masa jabatan periode 2019-2024, dalam rapat paripurna ke-5 DPR, Selasa (12/9).

Pelantikan ditandai dengan pengucapan sumpah dan janji dari ketiga anggota PAW. Tiga anggota ini adalah Indira Chunda Thita Syahrul yang merupakan putri dari Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Wisnu Wijaya Adi Putra dan Ujang Iskandar.

Indira menggantikan almarhum Muhammad Rapsel Ali yang juga menantu Wakil Presiden Maruf Amin dari Fraksi Partai Nasdem daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Selatan I. Sementara itu, Wisnu menggantikan Bukhori Yusuf dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapil Jawa Tengah I. Sedangkan Ujang menggantikan Ary Egahni Ben Bahat dari Fraksi Partai Nasdem dapil Kalimantan Tengah.

"Berdasarkan hal tersebut di atas, kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah kita dapat melakukan pelantikan anggota pengganti antarwaktu DPR R

sebelum kita memasuki acara rapat paripurna hari ini?" tanya Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9).

"Setuju," jawab sidang dewan diiringi ketukan palu Gobel tanda persetujuan.

Setelah itu, momen pelantikan terhadap tiga anggota PAW itu pun terjadi. Upacara pelantikan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus.

Lalu, Lodewijk membacakan sumpah dan janji ketiga anggota PAW sebelum resmi menandatangani jabatan anggota DPR RI.

"Patut saya ingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara RI, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan UUD RI 1945. Sumpah ini adalah terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran, saya harap saudara ikuti lafal sumpah yang akan saya pandu," kata Lodewijk. ● han

## Uang Rp27 Miliar dari Maqdir Jadi Barang Bukti Perkara Windy Purnama

JAKARTA (IM) - Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia menjadikan uang Rp27 miliar yang diserahkan pengacara Maqdir Ismail ke Kejaksaan Agung, dijadikan barang bukti perkara tersangka Windy Purnama (WP).

WP merupakan terdakwa kasus korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Adapun uang Rp 27 miliar itu awalnya diserahkan pengacara terdakwa Irwan Hermawan (IH), yakni Maqdir Ismail kepada penyidik Kejagung.

"Jumlah uang 27 miliar, ya, yang disita dalam perkara WP. Jumlah Rp 27 miliar sebagaimana pertanyaan teman-teman media, statusnya telah disita oleh penyidik dalam perkara WP," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana kepada wartawan, Senin (11/9).

Namun, Ketut belum menjelaskan keterkaitan Windy dengan uang tersebut. Menurut dia, rincian lebih lanjut akan terungkap dalam persidangan. Selain itu, kata Ketut, nasib uang yang disita itu akan ditentukan dalam persidangan.

"Apakah nanti ending-

nya adalah dirampas untuk negara, untuk kepentingan negara, atau nanti seperti apa kita lihat nanti proses persidangan, biar lebih transparan dan lebih keterbukaan," ujarnya.

Maqdir Ismail telah membawa dan mengembalikan uang tunai 1,8 juta dolar AS atau setara dengan Rp 27 miliar, yang diterima dari pihak swasta di kantornya kepada penyidik Kejagung. Uang tersebut diserahkan Maqdir pada Kamis (13/7) di Gedung Kejagung, Jakarta.

Pihak Kejagung sempat membantah uang tersebut terkait dengan kasus dugaan korupsi pembangunan BTS 4G. Sebab, konstruksi hukum peristiwa pidana BTS 4G sudah tuntas.

Namun, pihaknya akan mendalami asal-usul dana tersebut. Kejagung juga tengah mendalami sosok pemberi uang Rp 27 miliar itu. ● han

### PENGUMUMAN

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 12 September 2023 No. 476, yang dibuat di hadapan Notaris Sugeng Purnawan, S.H., Telah diambil keputusan untuk membubarkan Perseroan Terbatas PT. Buana Catur Pratama, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan. Demikian pengumuman ini dibuat atas kesepakatan bersama.

Direksi  
PT. Buana Catur Pratama

# 2 Polhukam

FOTO: ANTARA



### KASAL TERIMA BREVET KEHORMATAN PENERBANG TNI AL

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengikuti upacara penyematan Brevet Kehormatan Penerbang TNI AL di Lanud Juanda Surabaya, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (12/9). Penyematan Brevet tersebut sebagai bentuk penghormatan dari Puspenerbal.

# Jokowi Utus Menteri Bahlil ke Rempang Untuk Memberi Penjelasan kepada Warga

Persoalan hukum di kawasan Rempang sebenarnya sudah selesai. Cuma, ada proses perizinan yang tumpang tindih. Hal ini yang menyebabkan konflik.

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengugaskan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia untuk turun langsung ke Pulau Rempang.

Tujuannya, memberikan penjelasan mengenai kesepakatan yang sudah dilakukan antara pemerintah daerah (pemda) setempat dengan masyarakat soal pengelolaan lahan yang menjadi permasalahan di kawasan itu.

"Menurut saya nanti mungkin besok atau lusa Menteri Bahlil (Menteri Investasi) akan ke sana untuk memberikan penjelasan mengenai itu," ujar Jokowi usai mengunjungi Pasar Kranggot di Banten, sebagaimana dilansir dari keterangan resmi,

Selasa (12/9).

Presiden Jokowi merespons soal keriuhan di Pulau Rempang yang terjadi antara warga dan tim gabungan aparat penegak hukum pada pekan lalu. Menurut Kepala Negara, hal tersebut terjadi karena komunikasi yang kurang baik.

"Ya itu bentuk komunikasi yang kurang baik, kalau warga diajak bicara, diberikan solusi. Karena di situ sebenarnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunan tipe 45," ucap Jokowi.

"Tetapi ini tidak dikomunikasikan dengan baik. Akhirnya menjadi masalah," katanya menambahkan.

Persoalan Pulau Rempang menjadi sorotan pu-

blik setelah terjadi bentrokan antara warga dengan tim gabungan aparat penegak hukum pada Kamis (7/9) pekan lalu. Bentrokan ini terjadi karena warga menolak pengembang kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut.

Petugas gabungan mendatangi lokasi pukul 10.00 WIB, sedangkan ratusan warga memblokir jalan mulai dari Jembatan 4. Warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan memasang patok di Pulau Rempang.

Pemblokiran kemudian dilakukan dengan membakar sejumlah ban dan merobohkan pohon di akses jalan masuk menuju Rempang.

### Tumpang-tindih Perizinan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sebelumnya mengatakan, persoalan hukum soal kawasan Rempang sebenarnya sudah selesai.

Hanya saja, ada proses perizinan yang tumpang tindih sehingga menyebabkan konflik seperti saat ini.

"Rempang itu sebenarnya kalau masalah hukumnya sudah selesai. Jadi begini urutannya. Tahun 2004 ada memorandum of understanding (MoU) antara Badan Pengusahaan (BP) Batam atau pemdalah ya untuk pengembangan kawasan wisata di pulau-pulau yang terlepas dari pulau induknya," ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/9) kemarin.

"Memang ada peraturannya (untuk pengembangan). Nah, salah satunya Pulau Rempang itu. Itu diputuskan pengembangan wisata tahun 2001, 2002. Kemudian tahun 2004 ada perjanjian, MoU antara pengembang, dengan BP Batam," kata Mahfud.

Sebelum pengembangan dilaksanakan, ternyata pemda setempat sudah mengeluarkan lagi sejumlah izin kepada orang lain. Mahfud tidak memerinci

izin apa yang dimaksud. Namun, dia menjelaskan bahwa saat pengembang akan masuk, di kawasan Rempang sudah ada kegiatan dan penghuninya. "Ada penghuni lama dan seterusnya, dan seterusnya, sehingga ya diselesaikan," ujarnya.

Kemudian, izin-izin baru yang diterbitkan setelah MoU antara pengembang dengan BP Batam semuanya dibatalkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Merujuk pada pembatalan perizinan oleh Kementerian LHK itulah kemudian ada perintah untuk pengosongan kawasan rempang. Sebab, pada 2023 ini akan masuk sejumlah kegiatan sebagaimana yang sudah ditekan dalam MoU pada 2004.

"Nah, di situ lalu terjadi perintah pengosongan karena tahun ini akan masuk kegiatan-kegiatan yang sudah ditekan tahun 2004 sesuai dengan kebijakan tahun 2001, 2002," ujar Mahfud. ● han

## Petugas Rutan KPK Dipecat Setelah Ketahuan Lecehkan Istri Tahanan

JAKARTA (IM) - Salah satu petugas Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berinisial M dipecat setelah ketahuan melakukan pelecehan terhadap istri tahanan KPK.

"TMT (Terhentikan Mulai Tanggal) pemberhentian per 7 September 2023," katanya.

"Terkait tindak lanjut penanganan pelanggaran disiplin atas tindak asusila yang dilakukan petugas Rutan, KPK telah menjatuhkan hukuman

disiplin berat berupa pemberhentian terhadap saudara M," kata Kabag Pemberantasan Korupsi (KPK) berinisial M dipecat setelah ketahuan melakukan pelecehan terhadap istri tahanan KPK.

"TMT (Terhentikan Mulai Tanggal) pemberhentian per 7 September 2023," katanya.

Pemecatan tersebut merupakan tindak lanjut KPK atas pelanggaran disiplin terhadap M. KPK menyatakan bahwa M terbukti bersalah melang-

gar pelanggaran disiplin berat.

"Saudara M telah melanggar Pasal 3 huruf f PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS berupa perbuatan yang tidak menunjukkan integritas dan keteladanan sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan," ucap Ali.

"Saudara M juga telah melanggar Pasal 5 huruf a

PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS berupa penyalahgunaan wewenang," katanya menambahkan.

Ali menjelaskan, pemecatan terhadap M merupakan bentuk keseriusan dan komitmen KPK untuk tetap profesional menuntaskan perkara di internal lembaga sesuai lingkup penegakan disiplin pegawai dan kaidah-kaidah dalam hukumnya.

"Ketegasan ini juga sebagai upaya untuk menegakkan marwah kelembagaan KPK sesuai dengan nilai-nilai atau kode etik yang menjadi pedoman seluruh insan komisi, yaitu Integritas, Sinergi, Keadilan, Profesionalitas, dan Kepemimpinan," tambahanya.

Terbongkar adanya kasus asusila di lingkungan KPK, beberapa waktu lalu. Kasus asusila tersebut dilakukan oknum petugas rutan KPK berinisial M terhadap istri tahanan kasus korupsi. Kasus asusila tersebut pertama kali dibongkar oleh mantan Penyidik senior KPK, Novel Baswedan. Novel menyebutkan, pungli di rutan lembaga antirasuah berawal dari tindak lanjut kasus asusila oknum petugas KPK terhadap istri tahanan perkara korupsi.

"Saya tidak percaya bahwa kasus Rutan dibongkar Dewas KPK. Awal mula kasus Rutan KPK karena ada laporan dari istri tahanan KPK yang

mendapat perlakuan asusila oleh petugas KPK," kata Novel melalui akun Twitter-nya @nazazqitsha dikutip Jumat, 23 Juni 2023.

Ali Fikri sempat menguraikan kronologi kasus asusila oknum petugas rutan terhadap istri tahanan. Dijelaskan Ali, awalnya KPK menerima laporan dari masyarakat soal adanya dugaan perbuatan asusila oknum petugas rutan. Laporan tersebut, kemudian diteruskan kepada Dewas pada Januari 2023.

"Dewas kemudian melakukan analisis dan pemeriksaan terhadap pihak terkait, dilanjutkan sidang etik pada April 2023, dengan putusan pelanggaran etik sedang," kata Ali Fikri.

Ali menegaskan bahwa oknum petugas rutan tersebut telah dijatuhi sanksi etik oleh dewas. Adapun, sanksi yang diterima oknum petugas rutan KPK tersebut yakni pelanggaran etik sedang. Tapi, oknum tersebut juga diproses oleh inspektorat KPK terkait pelanggaran disiplin. "KPK juga menindaklanjuti dengan proses pemeriksaan di Inspektorat, terkait kedisiplinan pegawai," ungkap Ali.

Hasil proses inspektorat KPK menyatakan bahwa M terbukti bersalah melakukan pelanggaran disiplin berat. Oleh karenanya, KPK memutuskan untuk memecat M. ● han



### HASIL PENINDAKAN BEA CUKAI KALBAGBAR

Kepala DJBC Kalbagbar Imik Eko Putro (tengah) didampingi Kabid Penindakan dan Penyidikan Setiawan (kiri) dan Kabid Fasilitas Kepabeian dan Cukai Beni Novri (kedua kanan) saat memberikan keterangan pers di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (12/9). Sejak Januari hingga Agustus 2023, Bea Cukai Kantor Wilayah Bagian Barat telah mengungkap penyelundupan 69,63 kilogram sabu, 18 kilogram ganja, 6,293 butir ekstasi, dan menyita 3,5 juta batang rokok ilegal senilai Rp4,6 miliar.

### PENGUMUMAN

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 12 September 2023 No. 477, yang dibuat di hadapan Notaris Sugeng Purnawan, S.H., Telah diambil keputusan untuk membubarkan Perseroan Terbatas PT. Buana Catur Pratama, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan. Demikian pengumuman ini dibuat atas kesepakatan bersama.

Direksi  
PT. Buana Catur Pratama

### PENGUMUMAN

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 12 September 2023 No. 477, yang dibuat di hadapan Notaris Sugeng Purnawan, S.H., Telah diambil keputusan untuk membubarkan Perseroan Terbatas PT. Caraka Tirta Nusantara, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan. Demikian pengumuman ini dibuat atas kesepakatan bersama.

Direksi  
PT. Caraka Tirta Nusantara

### PENGUMUMAN

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 12 September 2023 No. 481, yang dibuat di hadapan Notaris Sugeng Purnawan, S.H., Telah diambil keputusan untuk membubarkan Perseroan Terbatas PT. Cipta Nusa Kirana, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan. Demikian pengumuman ini dibuat atas kesepakatan bersama.

Direksi  
PT. Cipta Nusa Kirana

### PENGUMUMAN

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 12 September 2023 No. 478, yang dibuat di hadapan Notaris Sugeng Purnawan, S.H., Telah diambil keputusan untuk membubarkan Perseroan Terbatas PT. Citra Gadhing Nusantara, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan. Demikian pengumuman ini dibuat atas kesepakatan bersama.

Direksi  
PT. Citra Gadhing Nusantara

### PENGUMUMAN

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 12 September 2023 No. 480, yang dibuat di hadapan Notaris Sugeng Purnawan, S.H., Telah diambil keputusan untuk membubarkan Perseroan Terbatas PT. Pacific Inti Persada, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan. Demikian pengumuman ini dibuat atas kesepakatan bersama.

Direksi  
PT. Pacific Inti Persada

### PENGUMUMAN

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 12 September 2023 No. 479, yang dibuat di hadapan Notaris Sugeng Purnawan, S.H., Telah diambil keputusan untuk membubarkan Perseroan Terbatas PT. Arjaya Cipta Leksana, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan. Demikian pengumuman ini dibuat atas kesepakatan bersama.

Direksi  
PT. Arjaya Cipta Leksana